



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

WAWASAN KEBANGSAAN DALAM KERANGKA NKRI

**Drs. Bambang Utomo, MA
Dra. Salhefni**

n Direktorat
budayaan

.6
M

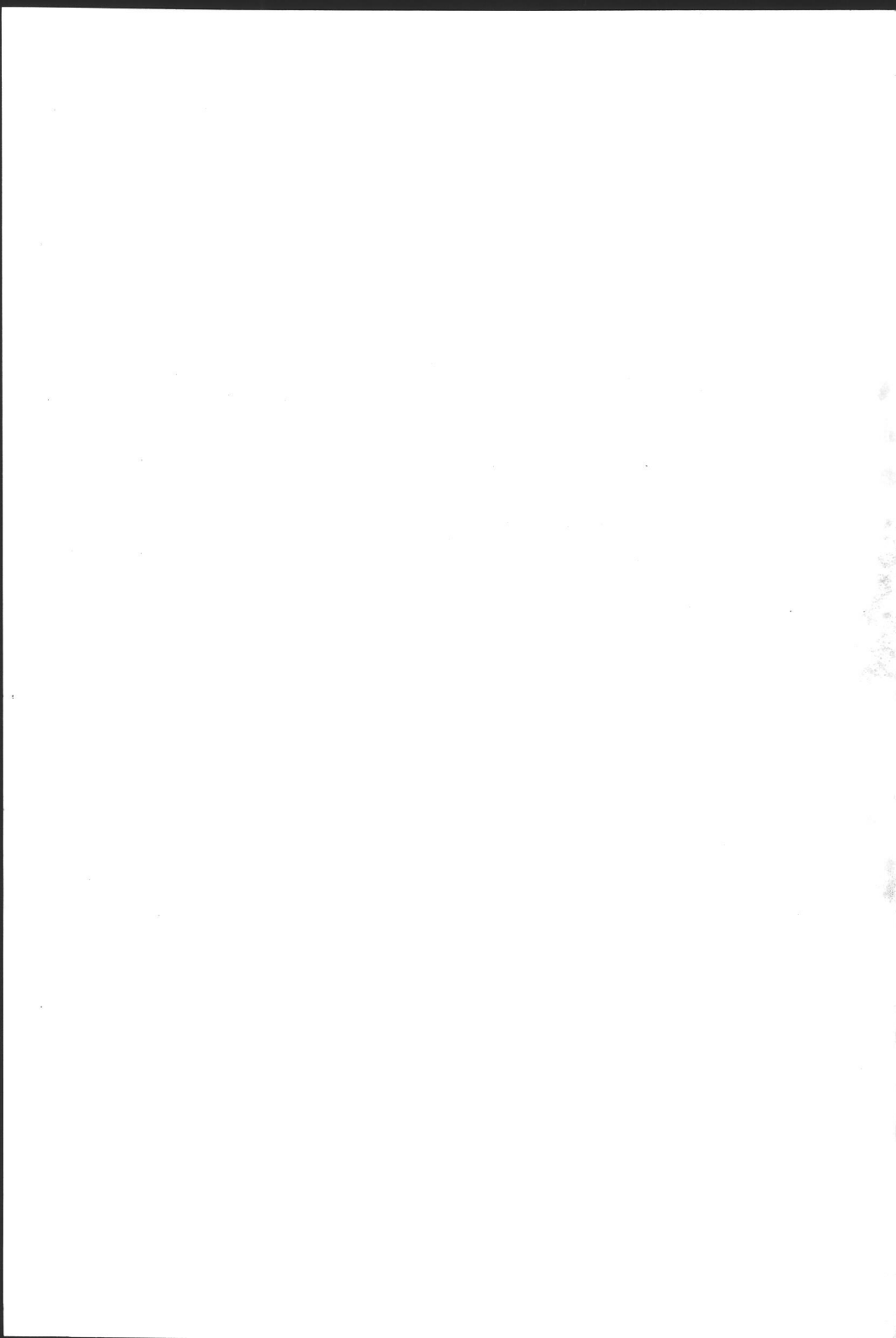
**PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
Jl. Raya Cinangka Km 19, Sawangan, Depok 16517**

352.6

BAM

w

**WAWASAN KEBANGSAAN
DALAM KERANGKA
NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA**



Prakata

Salah satu materi Diklat dalam Diklat Prajabatan bagi calon pegawai negeri sipil (PNS) adalah Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi ini dipandang sangat penting karena bertujuan membekali peserta dengan pemahaman yang bermakna untuk ikut serta membina dan memelihara persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara dalam era globalisasi.

Buku ini merupakan salah satu bahan pembelajaran yang dirancang untuk digunakan dalam Diklat Prajabatan calon PNS. Buku ini disusun sebagai penyempurnaan dari materi serupa. Isi bahan pembelajaran ini telah mempertimbangkan tingkat kesesuaian dan keseimbangan antara materi, metode, fasilitator, dan alokasi waktu yang tersedia. Diharapkan buku ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dalam proses pembelajaran yang berlangsung secara dinamis.

Penyusunan bahan ini merupakan bagian dari tugas yang dipercayakan pemerintah kepada Pusdiklat dalam menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan diklat pegawai di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Buku ini disusun oleh **Drs. Bambang Utomo, MA** (Kabid Penyelenggaraan Diklat Pusdiklat Pegawai Depdiknas) dan telah direvisi oleh **Dra. Salhefni**. Kepada yang bersangkutan, yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk menyusun dan merevisi bahan pembelajaran ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan.

Kami merasa masih banyak lagi yang harus dilakukan agar bahan pembelajaran ini memenuhi kebutuhan fasilitator dan peserta diklat. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan adanya tanggapan berupa kritik dan saran perbaikan.

Sawangan, Mei 2007

Kepala Pusdiklat Pegawai Depdiknas



Agus Dharma, PhD

NIP 130676057

Daftar Isi

PRAKATA	iii
PENDAHULUAN	1
PENGANTAR	1
TUJUAN PEMBELAJARAN	2
CAKUPAN BUKU INI	3
BAB 2 HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA	5
PENGANTAR	5
PENGERTIAN BANGSA DAN NEGARA	5
TEORI TERBENTUKNYA NEGARA	9
BENTUK DAN UNSUR NEGARA	11
RANGKUMAN	13
LATIHAN	14
BAB 3 NILAI-NILAI KEJUANGAN, PEMBANGUNAN KARAKTER, DAN KETAHANAN NASIONAL	15
PENGANTAR	15
NILAI-NILAI KEJUANGAN	15
DAYA SAING NASIONAL	20
MEMBANGUN KARAKTER BANGSA	22
KETAHANAN NASIONAL	24
RANGKUMAN	29
LATIHAN	30
BAB 4 WAWASAN KEBANGSAAN	33
PENGANTAR	33
PENGERTIAN WAWASAN KEBANGSAAN	34
WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA	35
INTEGRASI NASIONAL	40
WAWASAN KEBANGSAAN SEBAGAI KEKUATAN NASIONAL	46
RANGKUMAN	47
LATIHAN	49
BAB 5 PERMASALAHAN WAWASAN KEBANGSAAN	51
PENGANTAR	51
KEMEROSOTAN FAKTOR INTEGRASI BANGSA	52
UPAYA MENINGKATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	54
RANGKUMAN	57
LATIHAN	59
DAFTAR PUSTAKA	61



Pendahuluan

PENGANTAR

Kapan kita merasa menjadi bangsa yang disebut dengan bangsa Indonesia? Siapa sajakah yang merasa dirinya bangsa Indonesia? Bagaimana bangsa Indonesia diakui sebagai bangsa dan siapa yang mengakuinya? Perlukah kita mempunyai satu pandangan agar dapat diakui sebagai suatu bangsa? Beberapa pertanyaan itu penting kita pahami dalam rangka memupuk semangat kebangsaan.

Pada 1928 kita dikaruniai generasi muda yang sangat peduli akan nasib dan masa depan bangsanya. Hampir delapan dasawarsa yang lalu, para pemuda bangsa kita telah mengikrarkan tekad untuk bersatu melalui sumpah pemuda yang berisi pengakuan berbangsa satu, bangsa Indonesia; bertanah air satu, tanah air Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dapat kita catat bahwa sumpah pemuda telah berhasil menyatukan bangsa Indonesia dan 17 tahun kemudian mengantarkan bangsa Indonesia kepada kemerdekaannya. Selain itu, dapat pula kita catat bahwa sumpah pemuda telah juga berhasil mematahkan upaya pemecahbelahan bangsa Indonesia melalui berbagai gerakan kesukuan dan keagamaan sempit serta mematahkan setiap upaya untuk meruntuhkan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia.

Wawasan kebangsaan sebagai sudut pandang suatu bangsa dalam memahami keberadaan jati diri dan lingkungannya pada dasarnya

merupakan penjabaran dari falsafah bangsa itu sendiri sesuai dengan keadaan wilayah suatu negara dan sejarah yang dialaminya. Wawasan ini menentukan cara suatu bangsa memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, dan sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasionalnya serta bagaimana bangsa itu memandang diri dan lingkungannya baik ke dalam maupun ke luar.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hakikat dan pengejawantahan wawasan kebangsaan tersebut penting dipahami oleh setiap warga negara Indonesia, khususnya pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini karena dalam kedudukannya sebagai salah satu unsur aparatur negara, PNS harus juga mampu berperan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta Diklat diharapkan memiliki wawasan yang memadai tentang kebangsaan dalam rangka NKRI. Secara khusus, peserta diharapkan mampu:

- menjelaskan pengertian bangsa dan negara.
- menganalisis kerangka dasar pembentukan karakter bangsa
- membandingkan berbagai karakter bangsa yang membangun daya saing dan ketahanan nasional
- menjelaskan dan menerapkan nilai-nilai kejujuran dalam meningkatkan daya saing bangsa
- menjelaskan wawasan kebangsaan sebagai kekuatan nasional
- menganalisis masalah wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI.

CAKUPAN BUKU INI

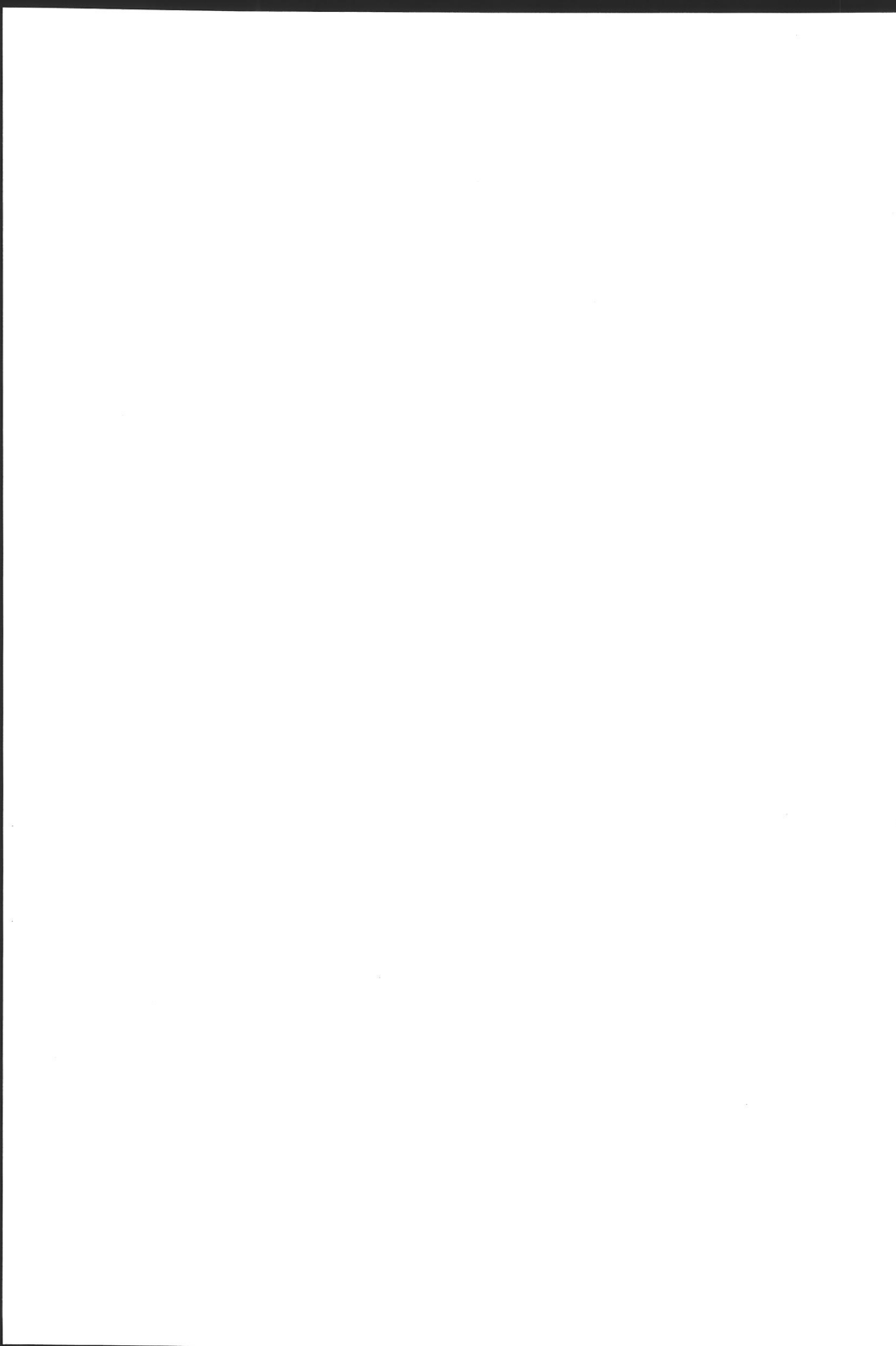
Buku ini terdiri atas empat bab yang diuraikan secara ringkas sebagai berikut.

Bab 1 menguraikan tentang pengertian bangsa dan negara, bentuk negara serta unsur yang menjadi dasar terbentuknya suatu negara.

Bab 2 menjelaskan tentang beberapa faktor yang perlu dipahami dalam konsep wawasan kebangsaan yang meliputi nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia, daya saing nasional, pembangunan karakter bangsa, serta ketahanan nasional dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.

Bab 3 menguraikan mengenai wawasan kebangsaan mulai dari pengertian, nilai dasar wawasan kebangsaan, dan makna wawasan kebangsaan. Bab ini juga menguraikan tentang integrasi nasional yang merupakan pengejawantahan dari wawasan kebangsaan serta wawasan nasional sebagai kekuatan bangsa Indonesia.

Bab 4 mencoba menganalisis kondisi bangsa Indonesia saat ini yang menyebabkan munculnya berbagai permasalahan disintegrasi bangsa serta upaya yang perlu dilakukan dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.



Bab 1

Hakikat Bangsa dan Negara

PENGANTAR

Indonesia adalah kesatuan yang berbentuk republik. Sebagai warga negara Indonesia kita perlu menyadari bahwa Indonesia bukanlah negara yang hany dihuni oleh satu suku bangsa, tetapi banyak suku bangsa dengan berbagai keragaman yang menyertainya. Namun, kita bersyukur bahwa kesamaan tujuan dari anggota beragam suku bangsa itu telah menyatukan kita menjadi satu bangsa besar yang menghuni negara kepulauan terbesar di dunia ini. Selain itu, peran bahasa Indonesia sebagai perekat persatuan bangsa juga tidak dapat dipungkiri.

Dalam bab ini diuraikan konsep negara dan bangsa dengan maksud agar para peserta dapat segera memahami konsep dimaksud. Dengan pemahaman ini diharapkan makin berkembang rasa kebangsaan dalam negara kepulauan yang syarat dengan kebhinnekaan ini. Bahasan bab ini dimulai dengan penjelasan pengertian bangsa dan negara. Selanjutnya dibahas teori terjadinya negara, dan akhirnya dibahas bentuk dan unsur-unsur negara.

PENGERTIAN BANGSA DAN NEGARA

Bangsa

Secara umum bangsa merupakan kumpulan kelompok masyarakat yang membentuk negara. Dalam arti sosiologis bangsa termasuk

kelompok paguyuban yang secara kodrati ditakdirkan untuk hidup bersama dan senasib sepenanggungan di dalam suatu negara. Misalnya, NKRI yang ditakdirkan terdiri atas banyak suku bangsa.

Dalam ilmu tata negara terdapat berbagai pengertian bangsa yang dikemukakan beberapa pakar kenegaraan yang ternama sebagai berikut.

- Bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama (hasrat bersatu) dengan perasaan setia kawan yang agung (*Ernest Renant*).
- Bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter yang tumbuh karena adanya perasaan senasib (*Otto Bauer*).
- Berdasarkan paham geopolitik, bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu yang timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya (*F. Ratzel*).
- Bangsa adalah buah hasil hidup manusia dalam sejarah. Suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak bisa dirumuskan secara pasti. Kebanyakan bangsa memiliki faktor-faktor obyektif tertentu yang membedakannya dari bangsa lain. Faktor-faktor itu berupa persamaan keturunan, wilayah, bahasa, adat istiadat, kesamaan politik, perasaan, dan agama (*Hans Kohn*).

Berdasarkan semua pendapat itu dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya bangsa adalah sekumpulan orang dalam suatu tempat atau wilayah yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama. Caranya adalah dengan mendirikan negara dan pemerintahannya yang akan mengurus terwujudnya aspirasi dan kepentingan bersama secara adil.

Meskipun di kalangan pakar kenegaraan belum terdapat persamaan pengertian bangsa, namun faktor obyektif yang terpenting dari suatu

bangsa adanya kehendak bersama, yang lebih dikenal dengan nasionalisme. Dalam kehidupan suatu bangsa, kita harus menyadari adanya keanekaragaman yang dilandasi oleh rasa persatuan dan kesatuan tanah air, bahasa, dan cita-cita. Setiap bangsa mempunyai empat unsur aspirasi sebagai berikut.

1. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas.
2. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya.
3. Keinginan untuk mandiri, unggul, individualitas, keaslian, atau keikhlasan. Misalnya, menjunjung tinggi bahasa nasional yang bukan diadopsi dari bahasa bangsa lain.
4. Keinginan untuk menonjol (unggul) di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestise.

Negara

Secara alamiah, manusia sebagai makhluk sosial sejak dahulu selalu hidup bersama-sama dalam suatu kelompok untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya; mencari makan, menanggulangi masalah; mengatasi ancaman dan gangguan, serta melanjutkan keturunan. Kelompok manusia itu, yang semula hidup berpindah-pindah tempat, kemudian karena perkembangan peradaban, mereka mulai hidup menetap pada suatu tempat tertentu dan memenuhi kebutuhan substansialnya dengan berternak dan bercocok tanam.

Agar kelompok-kelompok dimaksud ini dapat merasa aman, nyaman, dan tenteram; timbul kesadaran bahwa diperlukan seorang atau sekelompok kecil orang yang ditugaskan untuk mengatur dan

memimpin kelompok-kelompok manusia ini. Kepada pimpinan kelompok diberikan kekuasaan/kewenangan tertentu dan anggota kelompok diwajibkan untuk menaati peraturan atau perintah dari pemimpinya. Sejak itu timbullah dalam kelompok itu suatu kekuasaan pemerintahan yang sangat sederhana. Peraturan yang semula tidak tertulis, batasannya tidak jelas, dan hanya merupakan adat kebiasaan; lambat laun menjadi peraturan tertulis yang dilaksanakan dan ditaati.

Dengan makin besarnya anggota dan meluasnya kepentingan kelompok itu dan untuk mengatasi berbagai kesulitan yang timbul, baik internal maupun eksternal; selanjutnya muncul kebutuhan untuk membentuk suatu organisasi yang lebih teratur dan memiliki kekuasaan yang memadai. Organisasi ini sangat diperlukan untuk melaksanakan dan mempertahankan peraturan hidup agar dapat berjalan secara tertib. Organisasi yang memiliki kekuasaan seperti itulah yang kemudian berkembang menjadi negara.

Secara etimologi, istilah “negara” muncul dari terjemahan bahasa asing *staat* (Belanda, Jerman) dan *state* (Inggris). Kata ini berasal dari bahasa Latin, yaitu *status* atau *statum*, yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, “membuat berdiri,” dan “menempatkan.” Kata *status* juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan sifat atau keadaan tegak dan tetap. Dalam kaitan ini, negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi kekuasaan dari manusia-manusia (masyarakat) dan merupakan alat yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama.

Konsep negara sebagai organisasi kekuasaan menunjukkan bahwa keberadaan negara bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi. Dalam pengertian ini negara merupakan kesatuan sosial (masyarakat)

yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Dalam konteks organisasi kekuasaan, di dalam negara terdapat suatu mekanisme/tata hubungan kerja yang mengatur suatu kelompok manusia (rakyat) agar berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara. Agar negara dapat mengatur rakyatnya, maka negara diberi kewenangan yang dapat memaksa seluruh anggotanya untuk mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Pada saat yang sama, untuk menghindari adanya kekuasaan yang sewenang-wenang, negara juga menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan itu dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan, organisasi maupun oleh negara itu sendiri.

TEORI TERBENTUKNYA NEGARA

Teori terbentuknya negara dapat dijelaskan melalui beberapa teori, yaitu teori kenyataan, teori ketuhanan, teori perjanjian, dan teori penaklukan.

Teori Kenyataan

Timbulnya suatu negara itu adalah soal kenyataan. Apabila pada suatu ketika telah terpenuhi unsur-unsur negara (daerah, penduduk, dan pemerintah yang berdaulat) maka pada saat itu juga negara sudah telah ada.

Teori Ketuhanan

Selain karena adanya wilayah, penduduk yang bertekad, dan pemerintah yang berdaular, menurut teori ini timbulnya suatu negara

adalah juga atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak menghendakinya.

Teori Perjanjian

Negara timbul karena perjanjian yang dibuat antara orang-orang yang tadinya hidup bebas merdeka, terlepas satu sama lain tanpa ikatan kenegaraan. Perjanjian ini diadakan agar supaya kepentingan bersama dapat terpelihara dan terjamin, supaya “orang yang satu tidak merupakan binatang buas bagi orang yang lain” (*homo homini lupus*). Perjanjian itu disebut perjanjian masyarakat (*social contract*).

Teori Penaklukan

Suatu negara timbul karena serombongan manusia menaklukan suatu wilayah dan rombongan manusia lain. Agar daerah/rombongan itu tetap dapat dikuasai, maka dibentuklah suatu organisasi yang berupa negara.

Selain itu, suatu negara dapat pula terjadi karena pemberontakan terhadap negara lain yang menjajah, peleburan (*fusi*) antara beberapa negara menjadi satu negara baru, suatu daerah yang belum ada rakyatnya/pemerintahannya diduduki/dikuasai oleh bangsa/negara lain, atau erdasarkan referendum, di mana penduduk suatu wilayah sepakat melalui pemungutan suara untuk memisahkan diri dari suatu negara.

Perubahan itu dapat terjadi secara damai (*persetujuan dari negara yang tadinya menguasainya*) atau dapat juga terjadi melalui perjuangan bersenjata. Cara yang pertama timbul dengan perjanjian dan penyerahan kedaulatan, seperti yang terjadi pada Malaysia dan Brunei Darussalam misalnya. Cara yang kedua timbul cara

perjuangan bersenjata (revolusi), seperti yang terjadi pada Indonesia. Tentu saja cara kedua tidak semata berdasarkan kekerasan, tetapi juga melalui perjuangan diplomasi di dunia internasional.

Dalam hubungannya dengan konsep wawasan kebangsaan, penting untuk di kemukakan bahwa negara kebangsaan bukanlah suatu komunitas sosio-antropologis yang tumbuh secara alamiah. Negara kebangsaan adalah suatu komunitas politik yang dirancang, dibangun, dan dioperasikan berdasar wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu sendiri timbul, berkembang dan beroperasi berdasarkan persetujuan terus-menerus dari unsur-unsur komunitas politik itu.

BENTUK DAN UNSUR NEGARA

Bentuk Negara

Menurut teori-teori modern, bentuk negara yang utama adalah negara kesatuan dan negara serikat (federasi).

Negara Kesatuan. Negara kesatuan adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat di mana di seluruh negara yang berkuasa hanya satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Di dalam negara kesatuan, pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk mengatur seluruh wilayahnya melalui pembentukan daerah-daerah dalam wilayah negara (provinsi, kabupaten, dan kota) Pelaksanaan pemerintahan negara dalam negara kesatuan dapat dilakukan dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi.

- *Sistem sentralisasi*, yaitu segala urusan negara langsung dikendalikan oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah hanya melaksanakannya.
- *Sistem desentralisasi*, di mana kepada daerah dalam daerah-

daerah otonom berwenang mengurus urusan rumah tangganya sendiri (otonomi daerah).

Bentuk negara kesatuan pada umumnya mempunyai sifat-sifat berikut.

- Kedaulatan negara mencakup ke dalam dan ke luar yang ditangani pemerintah pusat.
- Negara hanya mempunyai satu undang-undang dasar, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu dewan perwakilan rakyat.
- Kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan ditetapkan secara terpusat.

Negara Serikat

Negara serikat atau federasi negara adalah suatu negara yang merupakan gabungan beberapa negara, yang menjadi bagian dari negara serikat itu. Negara-negara bagian ini semula merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan menggabungkan diri dalam suatu negara serikat, maka negara yang tadinya berdiri sendiri kemudian menjadi negara bagian; melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkan kepada negara serikat (federal). Kekuasaan yang diserahkan itu disebutkan satu demi satu dan hanya kekuasaan yang disebutkan itulah yang diserahkan kepada negara serikat.

Kekuasaan asli ada di negara bagian dan masing-masing negara bagian berhubungan langsung dengan rakyatnya. Kekuasaan dari negara serikat adalah kekuasaan yang diterimanya dari negara bagian. Biasanya yang diserahkan oleh negara-negara bagian kepada negara

serikat ialah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, dan urusan pos dan telekomunikasi.

Unsur Negara

Pada umumnya dikatakan bahwa suatu negara itu harus memenuhi syarat-syarat berikut (1) rakyat yang bersatu; (2) daerah atau wilayah; (3) pemerintah yang berdaulat dan mendapat pengakuan dari negara lain. Konvensi Montevideo pada 1933 menyebutkan unsur-unsur berdirinya suatu negara antara lain berupa rakyat, wilayah yang tetap, dan pemerintah yang mampu mengadakan hubungan internasional. Dari pendapat tersebut, unsur rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat merupakan unsur konstitutif karena keberadaannya harus ada. Sedangkan pengakuan dari negara lain merupakan unsur deklaratif yang bersifat formalitas, karena diperlukan dalam rangka memenuhi unsur tata aturan pergaulan internasional.

RANGKUMAN

1. Pengertian bangsa mengacu pada sekumpulan orang dalam suatu tempat atau wilayah yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama dengan mendirikan negara dan pemerintahan sendiri yang akan mengurus terwujudnya aspirasi dan kepentingan bersama secara adil. Meskipun di kalangan pakar kenegaraan belum terdapat persamaan pengertian bangsa, namun faktor obyektif yang terpenting dari suatu bangsa adanya kehendak bersama, yang lebih dikenal dengan nasionalisme.
2. Negara berkembang dari sekelompok orang yang bergabung untuk menyelenggarakan kepentingan bersama. Kelompok-kelompok itu kemudian makin banyak dan membesar yang akhirnya bersepakat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri dalam batasan wilayah tertentu.

3. Pengertian negara mengacu pada suatu organisasi kekuasaan dari manusia-manusia (masyarakat) dan merupakan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan bersama.
4. Terjadinya suatu negara dapat dijelaskan melalui beberapa teori, yaitu teori kenyataan, teori ketuhanan, teori perjanjian, dan teori penaklukan.
5. Bentuk negara yang utama adalah negara kesatuan dan negara serikat (federasi). Negara kesatuan adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat di mana di seluruh negara yang berkuasa hanya satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Pelaksanaan pemerintahan negara dalam negara kesatuan dapat dilakukan dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Negara serikat atau federasi negara adalah suatu negara yang merupakan gabungan beberapa negara, yang menjadi bagian dari negara serikat itu.
6. Pada umumnya dikatakan bahwa suatu negara itu harus memenuhi syarat-syarat berikut (1) rakyat yang bersatu; (2) daerah atau wilayah; (3) pemerintah yang berdaulat dan mendapat pengakuan dari negara lain. Ketiga syarat tersebut merupakan unsur konstitutif, sedangkan pengakuan dari negara lain merupakan unsur deklaratif yang sifatnya formalitas.

LATIHAN

1. Jelaskan pengertian bangsa.
2. Jelaskan pengertian negara dan teori terjadinya suatu negara.
3. Jelaskan bentuk-bentuk negara dan sistem pemerintahan dari masing-masing bentuk negara tersebut.
4. Sebutkan unsur-unsur pokok sebagai syarat terbentuknya suatu negara sesuai dengan pengetahuan Saudara.
5. Jelaskan penerapan teori tentang negara dan bangsa di Indonesia.

Bab 2

Nilai-nilai Kejuangan, Pembangunan Karakter, dan Ketahanan Nasional

PENGANTAR

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa bangsa pada dasarnya adalah sekumpulan orang dalam suatu tempat atau wilayah yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama. Orang-orang ini yang berbeda dalam banyak hal bersepakat mendirikan negara dan pemerintahan yang akan mengurus terwujudnya aspirasi dan kepentingan bersama secara adil. Negara yang terbentuk secara ini disebut sebagai negara bangsa, misalnya NKRI. Negara kita ini yang kita bangun dengan kerja keras melalui perjuangan bersenjata dan diplomasi, bukan negara bagi suku atau agama tertentu, tetapi negara yang bersandarkan pada cita-cita bersama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam bab ini akan diuraikan nilai-nilai kejuangan yang menjiwai perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Uraian berikutnya adalah mengenai upaya membangun karakter dan daya saing bangsa. Hal ini sangat perlu dipahami sebagai dasar pembentukan ketahanan bangsa dalam upaya melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

NILAI-NILAI KEJUANGAN

Nilai-nilai kejuangan adalah konsep yang berkenan dengan sifat, mutu,

keadaan tertentu yang berguna bagi manusia dan kemanusiaan yang menyangkut upaya tak kenal lelah untuk tetap eksis secara bermartabat. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia nilai-nilai kejuangan dimaksudkan untuk menggambarkan daya dorong perlawanan dan pendobrak yang mampu membawa bangsa ini untuk membebaskan dirinya dari penjajahan dan bebas merdeka. Nilai kejuangan diletakkan pada upaya selama generasi demi generasi untuk mencapai kemerdekaan. Sebutan generasi 1945 sangat mengemuka karena pada 1945 bangsa kita berhasil memerdekakan diri dari penjajahan. Tentu saja kemerdekaan bangsa itu bukan semata-mata hasil perjuangan generasi 45. Jauh sebelumnya generasi demi generasi telah bangkit dengan berbagai upaya untuk mencapai kemerdekaan. Nilai-nilai kejuangan para generasi sebelum kita itu perlu diwariskan hingga proses perkembangan dan pembangunan bangsa ini berlangsung terus dan tidak memudar.

Hakikat Mempelajari Perjuangan Bangsa

Hakikat mempelajari dan menghayati perjuangan bangsa adalah upaya membangkitkan kesadaran nasional. Kita perlu menelaah peristiwa nasional di masa lampau, mengkaji situasi nasional di masa kini, dan menyerap aspirasi nasional di masa datang.

Dari aspek politik, peristiwa nasional di masa lampau merupakan berkat perjuangan bangsa yang telah mampu bernegara di tingkat nasional, yaitu negara kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Dari aspek sosial ekonomi kita pernah mencapai martabat bangsa yang penuh ketentraman, kesejahteraan, kemakmuran “gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja,” mampu membuktikan dalam aspek pertanian, perdagangan, pelayaran, dan sebagainya. Dari aspek rohani kita telah menerapkan prinsip-prinsip toleransi hidup beragama.

Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia telah memecah belah kehidupan bangsa. Kita kehilangan kemerdekaan, baik bidang politik dan ekonomi maupun sendi-sendi kemasyarakatan yang menimbulkan penderitaan lahir dan batin. Akibat penindasan dalam berbagai bentuk, rakyat pada awalnya bangkit melakukan perlawanan yang sifatnya lokal.

Berkat pengalaman sejarah perjuangan bangsa dalam mengusir penjajahan dan mengemban amanat penderitaan rakyat, akhirnya bangsa Indonesia mampu menjadi bangsa yang bersatu, yang memiliki semangat pengabdian dan rela berkorban. Hal ini karena adanya kesadaran dan rasa tanggung jawab membela kebenaran, keadilan, dan kejujuran demi nusa dan bangsa yang tercinta.

Makna Jiwa Perjuangan

Jiwa perjuangan bangsa merupakan semangat untuk meneruskan perjuangan menghacurkan seluruh kekuatan yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara di persada Nusantara. Ini adalah sikap mental yang mencerminkan moral nasional yang luhur berikut ini.

- Jiwa merdeka, yaitu jiwa yang sadar akan kemampuan sendiri.
- Jiwa persatuan dan kesatuan bangsa.
- Jiwa konsekuen tanpa pamrih dan sederhana.
- Jiwa kokoh yang tak kenal menyerah.
- Jiwa propatria yaitu rasa cinta yang besar terhadap tanah air.
- Jiwa kepeloporan dan kepemimpinan.
- Jiwa keikhlasan berjuang.

Nilai-nilai yang Diwariskan

Secara historis bangsa Indonesia telah melalui perjuangan yang begitu panjang untuk dapat mewujudkan NKRI. Sejak memproklamkan kemerdekaannya pada 1945, bangsa Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan dengan beragam pengaruh. Namun, sistem nilai yang melandasi pembangunan bangsa Indonesia sampai saat ini tidak berubah yaitu Pancasila dan UUD 1945. Kesetiaan terhadap nilai-nilai Pancasila telah teruji melalui berbagai peristiwa yang terjadi yang ingin merongrong kedaulatan bangsa Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai tersebut merupakan warisan luhur yang telah dianut oleh seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila yang masing-masing merupakan nilai-nilai intrinsik yang abstrak, umum, dan universal tetap utuh.

Nilai-nilai Dalam Pembukaan UUD 1945

1. NKRI yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan negara mengatasi segala paham golongan, dan paham perseorangan.
2. Tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
3. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
4. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
5. Negara yang merdeka dan berdaulat.
6. Anti penjajahan, karena penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Prinsip-prinsip Penjelmaan Pancasila

Prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945

1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik (Pasal 1 ayat (1)).
2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan pangkal ide kesetaraan antara individu dan masyarakat yang bersumber pada sifat kodrat individu makhluk sosial sebagai kesatuan dwitunggal (Pasal 28 a).
3. Sistem sosial budaya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika.
4. Sistem politik atas dasar kesamaan kedudukan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1).
5. Sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan (Pasal 33 ayat 1).
6. Sistem pembelaan Negara berdasarkan hak dan kewajiban bagi semua warga Negara (Pasal 30 ayat 1).
7. Sistem pemerintahan demokrasi berdasarkan sendi-sendi negara hukum (pasal 1 ayat 3), kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat 2).
8. Pemerintahan yang bertanggung jawab pada rakyat.
9. Pemerintah presidensial: Presiden adalah kepala pemerintahan (Pasal 4 ayat 1).
10. Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 20 a ayat 1)
11. Kekuatan daerah (pasal 18).

Prinsip-prinsip yang lahir dari perjuangan untuk mencapai, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan.

1. Rasa senasib sepenanggungan dan rasa persatuan yang kuat.

2. Mempertahankan dan mengembangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang berakar pada sejarah dan kebudayaan bangsa.
3. Mengambil segi-segi positif dari kebudayaan bangsa lain yang bermanfaat untuk pembangunan bangsa dan negara.
4. Tridarma, yaitu merasa ikut memiliki, bertanggung jawab. dan mawas diri.
5. Rasa kekeluargaan dan prinsip hidup gotong royong.

Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diwariskan tersebut secara terus menerus harus ditegakkan dan ditaati agar membudaya dan sekaligus sebagai kewajiban; sehingga menjadi norma yang sangat berharga untuk diwariskan dari generasi ke generasi Nilai-nilai yang telah diwariskan tersebut harus terus dipertahankan dan dikembangkan selaras dengan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Tanpa adanya kehendak dan keikhlasan menggali dan mengembangkan nilai-nilai kejuangan bangsa akan membawa generasi penerus kehidupan kehilangan arah dan pedoman dalam upaya mempertahankan jiwa proklamasi 17 agustus 1945 atau nilai-nilai kejuangan bangsa.

DAYA SAING NASIONAL

Daya saing adalah kemampuan atau upaya untuk menampilkan keunggulan dalam bidang-bidang tertentu dalam kaitannya dengan pihak-pihak yang bersaing. Dengan demikian, daya saing nasional dapat diartikan sebagai kemampuan bangsa Indonesia untuk menampilkan keunggulannya dalam berbagai bidang sesuai dengan kemampuan dan potensi/sumber daya yang dimiliki. Dalam menghadapi era globalisasi, bangsa Indonesia harus selalu berupaya memelihara dan meningkatkan daya saing nasionalnya agar tetap eksis di antara bangsa-bangsa lain di dunia.

Potensi dan sumber daya setiap daerah harus terus digali dan dikembangkan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing nasional. Kemampuan komperatif antardaerah bukan ditujukan untuk menonjolkan kedaerahan yang sempit, melainkan untuk untuk menampilkan kemampuan dan keunggulan yang beragam dalam kerangka NKRI. Oleh sebab itu, daya saing bangsa Indonesia harus berlandaskan pada wawasan kebangsaan yang kokoh.

Untuk menampilkan daya saing yang bertumpu pada kemampuan dan keunggulan masing-masing daerah, pemerintah berkewajiban menciptakan iklim yang kondusif bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui berbagai kebijakan yang membuka peluang bisnis pada tingkat daerah. Pemberdayaan ekonomi daerah merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kemandirian dan daya saing daerah. Dalam konteks global, daya saing lokal dan regional harus saling mendukung dan melengkapi guna meningkatkan daya saing nasional.

Upaya membangun daya saing nasional sangatlah penting karena kesinambungan pertumbuhan ekonomi kita semakin tergantung pada kemampuan kita untuk bersaing dengan produk dari negara-negara lain, baik di dalam maupun luar negeri. Modal daya saing nasional yang dibangun berlandaskan kekuatan daya saing daerah ini sejalan dengan kebijakan otonomi daerah. Daerah sekarang memiliki kewenangan yang lebih luas dan nyata untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Daya saing nasional yang didukung oleh daya saing daerah yang relatif merata akan merupakan keunggulan yang tiada taranya.

MEMBANGUN KARAKTER BANGSA

Pengertian

Membangun dapat berarti memperbaiki, membina, mendirikan, atau mengadakan sesuatu. Karakter adalah tabiat, watak, atau sifat-sifat seseorang yang membedakannya dari orang lain. Dalam konteks pembelajaran ini membangun karakter adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, dan/atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak (budi pekerti) insan manusia (masyarakat) sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa upaya membangun karakter akan menggambarkan hal-hal pokok sebagai berikut.

- Merupakan suatu proses yang terus-menerus dilakukan untuk membentuk tabiat, watak, dan sifat-sifat yang berlandaskan pada semangat pengabdian dan kebersamaan.
- Menyempurnakan karakter yang ada untuk terwujudnya karakter yang diharapkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
- Membina karakter yang ada sehingga menampilkan karakter yang kondusif dalam kehidupan bernasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilandasi dengan nilai-nilai falsafah bangsa yakni Pancasila.

Karakter Positif Bangsa

Membangun karakter bangsa pada hakikatnya adalah semua upaya yang dilakukan agar bangsa atau masyarakat memiliki karakter berikut.

- Saling menghormati dan saling menghargai di antara sesama.
- Rasa kebersamaan dan tolong menolong.
- Rasa persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa.
- Kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Bermoral, berakhlak yang dilandasi oleh nilai-nilai agama.
- Berperilaku yang senantiasa menggambarkan nilai-nilai agama, nilai-nilai hukum, dan nilai-nilai budaya.
- Bersikap dan berperilaku yang menggambarkan nilai-nilai kebangsaan.

Karakter bangsa mempunyai makna atau nilai yang sangat mendasar untuk memengaruhi segenap pikiran, perasaan, dan perbuatan setiap insan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai yang dimaksud adalah antara lain kejujuran, semangat, kebersamaan atau gotong royong, kepedulian atau solidaritas, sopan santun, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, dan tanggung jawab.

Nilai-nilai tersebut tampaknya cenderung semakin luntur dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus dan konflik yang terjadi di masyarakat, baik konflik antarkelompok masyarakat, antaretnik, maupun konflik politik. Untuk itu, pembangunan karakter bangsa menjadi faktor yang sangat penting dalam menyinergikan segenap potensi anak bangsa untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

KETAHANAN NASIONAL

Pengertian

Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan keteguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Oleh karena itu, ketahanan nasional harus senantiasa dibina untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup bangsa. Dengan perkataan lain, makin tinggi tingkat ketahanan nasional suatu bangsa, makin kuat pula posisi bangsa tersebut, baik ke luar maupun ke dalam.

Ciri dan Asas Ketahanan Nasional

Ciri Ketahanan Nasional

1. Ketahanan nasional merupakan prasyarat bagi bangsa yang sedang membangun dirinya menuju bangsa yang maju dan mandiri.
2. Menuju dan mempertahankan kelangsungan hidup. Bagi bangsa yang baru membangun dirinya tidak lepas dari pencapaian tujuan sebagaimana dicita-citakan.
3. Ketahanan nasional diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan yang berdasarkan pada rasa cinta tanah air, setia kepada perjuangan, dan ulet dalam usaha. Keuletan ini didasarkan pada ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sesuai dengan perubahan yang dihadapi sebagai akibat dinamika perjuangan.

4. Pengembangan ketahanan nasional didasarkan baik pada kondisi alamiah maupun kondisi sosial, sesuai dengan perkembangan dan situasi yang dihadapi bangsa.
5. Dijiwai wawasan nasional. Dengan landasan semangat integralistik, bangsa Indonesia mengembangkan diri atas dasar: rasa nasionalisme Indonesia, pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju dan mandiri, pembangunan yang berwawasan teknologi berwajah manusiawi, dan berperan dalam ketertiban dunia atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6. Pola umum operatif didasarkan Pancasila dan UUD 1945. Gerakan pembangunan nasional merupakan keseluruhan semangat yang diarahkan dalam rangka pengamalan Pancasila.

Asas Ketahanan Nasional

Pengembangan Ketahanan nasional bangsa Indonesia didasarkan pada asas-asas berikut.

1. ***Kesejahteraan dan keamanan.*** Penyelenggaraan ketahanan nasional dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang senantiasa terdapat pada setiap saat dalam kehidupan nasional sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi.
2. ***Utuh, menyeluruh, dan terpadu.*** Ketahanan nasional mencakup kehidupan bangsa secara menyeluruh dari seluruh kehidupan bangsa dalam wujud persatuan dan kesatuan, perpaduan yang selaras, serasi dan seimbang dari seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara.
3. ***Kekeluargaan.*** Sikap kekeluargaan mengandung kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, rasa tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4. *Mawas diri*. Dalam berinteraksi dengan lingkungan baik ke dalam maupun keluar, bangsa Indonesia harus mawas diri. Pengaruh interaksi ini akan memberikan dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif sehingga diperlukan mawas diri. Khusus dalam rangka arus globalisasi, bangsa Indonesia harus pandai dalam menyesuaikan diri.

Pengembangan Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional yang dikembangkan bangsa Indonesia mencakup yang berikut ini.

1. Ketahanan nasional bidang ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
2. Ketahanan nasional bidang politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi yang bertumpu pada pengembangan demokrasi Pancasila dan UUD tahun 1945.
3. Ketahanan nasional bidang ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD tahun 1945, yang mengandung kemampuan menerapkan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional.
4. Ketahanan nasional bidang sosial budaya bangsa yang menjiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila.
5. Ketahanan Nasional bidang pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan negara yang dinamis.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketahanan Nasional

1. **Tradisi.** Tradisi ini memberikan kepada masyarakat/bangsa seperangkat nilai dan kaidah yang diperlukan untuk menjawab tantangan setiap tahap perkembangan. Tradisi sosial ini pada dasarnya bersifat dinamis, karena itu nilai-nilai serta kaidah-kaidah yang tidak dapat menjawab tantangan, akan lenyap secara wajar.
2. **Pendidikan.** Pendidikan merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap ketahanan di bidang sosial budaya. Pendidikan dalam arti luas ialah usaha untuk mendewasakan manusia agar dapat mengembangkan potensinya serta berperan serta secara penuh dalam menumbuhkan kehidupan sosial sesuai dengan tuntutan zaman.
3. **Inisiatif.** Didalam masyarakat berkembang inisiatif pemerintah dan potensi yang ada padanya merupakan yang paling kuat dan mampu menggerakkan pendidikan secara luas.
4. **Teknologi informasi dan komunikasi.** Pemerintah harus mampu mengatur pendidikan formal berencana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi mutakhir.
5. **Kepemimpinan para penyelenggara negara.** Untuk membina dan membangun masyarakat modern, diperlukan kepemimpinan nasional yang kuat dan berwibawa.
6. **Tujuan nasional.** Tujuan nasional dapat merupakan unsur penggerak, pemersatu, pemberi motivasi, dan merupakan salah satu identitas nasional. Tujuan selalu berintikan falsafah negara.
7. **Kepribadian nasional.** Kepribadian nasional merupakan hasil perkembangan sejarah dan cita-cita bangsa yang dirumuskan sebagai dasar kehidupan bangsa. Kepribadian ini perlu dipupuk, dibina dan dimasyarakatkan pada setiap generasi karena kepribadian nasional inilah merupakan daya tangkal yang sangat strategis untuk menghadapi tantangan asing.
8. **Pertahanan dan keamanan.** Pertahanan dan keamanan

merupakan salah satu fungsi pemerintahan dalam menegakkan ketahanan nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan negara serta keamanan hasil perjuangannya.

Sifat-sifat Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

1. ***Manunggal***. Ketahanan nasional bersifat manunggal, dalam arti terdapat integrasi yang serasi dan selaras antara trigatra dan pancagatra.
2. ***Mawas ke dalam***. Ketahanan nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara sendiri, karena bertujuan mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya sendiri.
3. ***Berkewibawaan***. Pandangan yang bersifat manunggal menghasilkan kewibawaan nasional yang harus diperhitungkan oleh pihak lain serta mempunyai daya pencegah.
4. ***Dinamis***. Ketahanan nasional suatu bangsa tidak tetap keadaannya. Ia meningkat atau menurun sesuai dengan kondisi dan situasi bangsa itu sendiri.
5. ***Tidak membenarkan sikap adu kekuatan dan kekuasaan***. Konsep ketahanan nasional dapat dipandang sebagai alternatif dari konsepsi politik kekuatan yang mengutamakan adu kekuatan dan kekuasaan yang masih dianut oleh negara-negara maju pada umumnya.
6. ***Percaya kepada diri sendiri***. Bangsa yang merdeka dan berdaulat harus yakin bahwa ia dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik, dan tidak sangat tergantung kepada bantuan luar.
7. ***Tidak bergantung kepada pihak lain***. Pada umumnya negara berkembang merupakan bekas jajahan dan masih dipengaruhi oleh mental kolonial dan masih merasa bergantung kepada bekas

penjajahnya. Sikap mental seperti ini harus secara sadar dikikis habis.

RANGKUMAN

1. Nilai-nilai kejuangan adalah konsep yang berkenaan dengan sifat, mutu, keadaan tertentu yang berguna bagi manusia dan kemanusiaan yang menyangkut upaya tak kenal lelah untuk tetap eksis secara bermartabat.
2. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia nilai-nilai kejuangan dimaksudkan untuk menggambarkan daya dorong perlawanan dan pendobrak yang mampu membawa bangsa ini untuk membebaskan dirinya dari penjajahan dan bebas merdeka.
3. Hakikat mempelajari dan menghayati perjuangan bangsa adalah upaya membangkitkan kesadaran nasional. Kita perlu menelaah peristiwa nasional di masa lampau, mengkaji situasi nasional di masa kini, dan menyerap aspirasi nasional di masa datang.
4. Jiwa perjuangan bangsa merupakan semangat untuk meneruskan perjuangan mengahcurkan seluruh kekuatan yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara di persada Nusantara. Ini adalah sikap mental yang mencerminkan moral nasional yang luhur yang antara lain jiwa merdeka, persatuan, konsekuen, kokoh, propatria, kepeloporan dan kepemimpinan, serta keikhlasan.
5. Sistem nilai yang melandasi pembangunan bangsa Indonesia sampai saat ini tidak berubah yaitu Pancasila dan UUD 1945. Kesetiaan terhadap nilai-nilai Pancasila telah teruji melalui berbagai peristiwa yang terjadi yang ingin merongrong kedaulatan bangsa Indonesia.
6. Daya saing nasional merupakan kemampuan bangsa Indonesia untuk menampilkan keunggulannya dalam berbagai bidang sesuai dengan kemampuan dan potensi/sumber daya yang dimiliki.

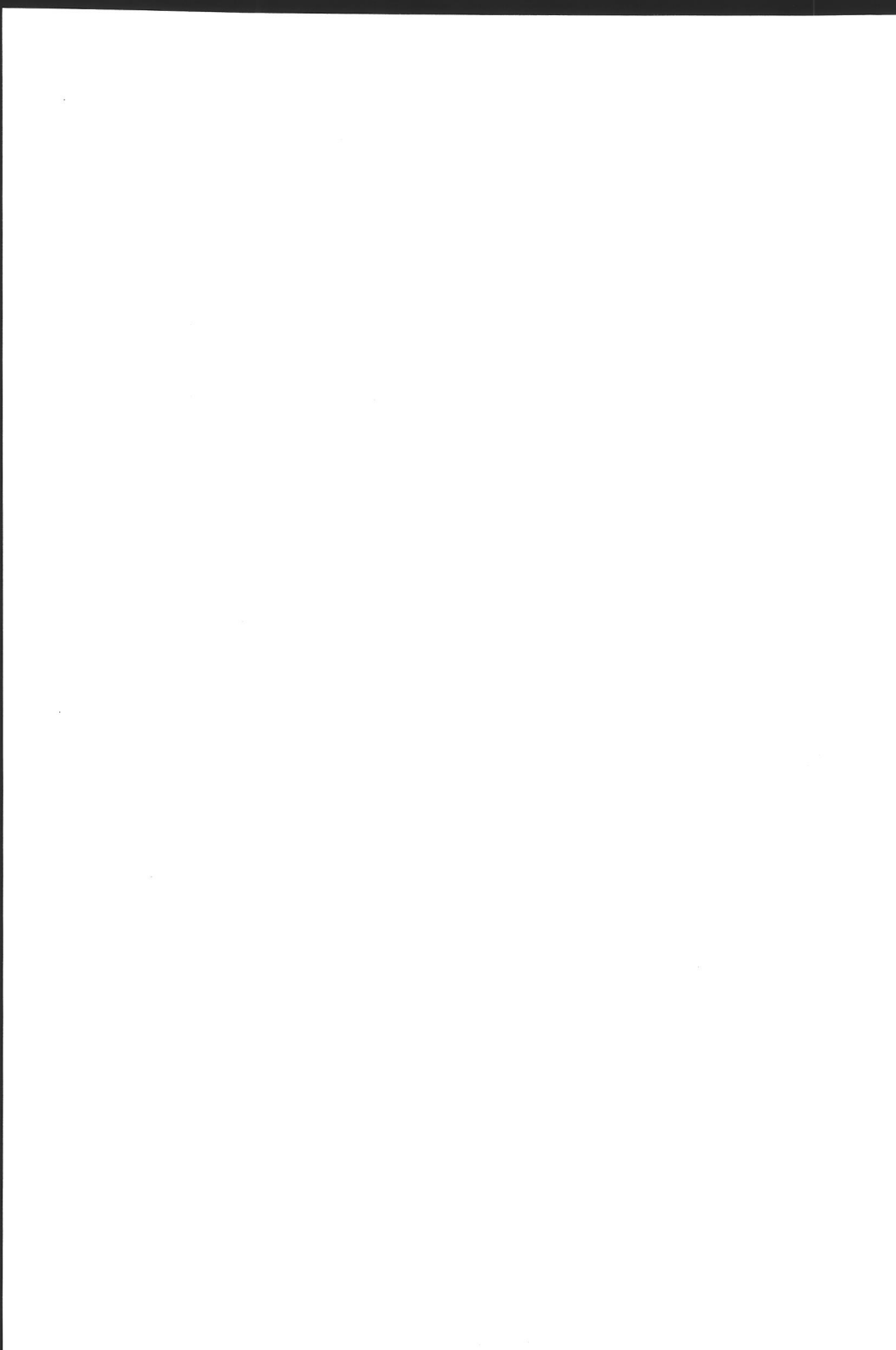
Dalam menghadapi era globalisasi, bangsa Indonesia harus selalu berupaya memelihara dan meningkatkan daya saing nasionalnya agar tetap eksis di antara bangsa-bangsa lain di dunia

7. Membangun karakter bangsa adalah semua upaya yang dilakukan agar bangsa atau masyarakat antara lain saling menghormati dan saling menghargai, memiliki rasa kebersamaan dan tolong menolong, bersatu, peduli, dan bermoral.
8. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan keteguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya.
9. Pengembangan Ketahanan nasional bangsa Indonesia didasarkan pada asas kesejahteraan dan keamanan; utuh, menyeluruh, dan terpadu; kekeluargaan; dan mawas diri. Ketahanan nasional yang dikembangkan bangsa Indonesia mencakup bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan nasional adalah tradisi, pendidikan, inisiatif, teknologi informasi dan komunikasi, kepemimpinan para penyelenggara negara, tujuan dan kepribadian nasional, serta pertahanan dan keamanan. Ketahanan nasional antara lain memiliki sifat-sifat manunggal, mawas ke dalam, berwibawa, dinamis, tidak membenarkan adu domba dan kekuasaan, dan percaya kepada diri sendiri.

LATIHAN

1. Jelaskan pengertian nilai kejuangan.

2. Jelaskan alasan pengaitan nilai kejuangan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
3. Jelaskan hakikat mempelajari perjuangan bangsa.
4. Jelaskan nilai-nilai prinsip yang diwariskan dalam perjuangan bangsa.
5. Jelaskan pengertian daya saing nasional dan alasan perlunya meningkatkan daya saing nasional.
6. Jelaskan pengertian membangun karakter dan ciri-ciri suatu bangsa yang mempunyai karakter.
7. Jelaskan faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun karakter dalam NKRI.
8. Jelaskan pengertian dan aspek-aspek ketahanan nasional.



Bab 3

Wawasan Kebangsaan

PENGANTAR

Kita telah memahami bahwa nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia berkenaan dengan upaya tidak kenal lelah untuk tetap eksis secara bermartabat. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah menunjukkan pada kita betapa nilai-nilai kejuangan itu telah membangkitkan semangat pantang menyerah untuk membebaskan diri dari berbagai bentuk penindasan. Itu sebabnya, nilai-nilai kejuangan para generasi sebelum kita perlu diwariskan hingga proses perkembangan dan pembangunan bangsa ini tidak memudar.

Nilai-nilai itu seyogianya melandasi upaya pembentukan karakter bangsa yang memengaruhi segenap pikiran, perasaan, dan perbuatan setiap insan Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keadaan menunjukkan bahwa nilai-nilai itu tampaknya cenderung kurang menjiwai kehidupan berbangsa. Kehidupan kita sehari-hari menggambarkan melemahnya keinginan untuk membalut perilaku kita dengan nilai-nilai luhur itu. Perlu ditekankan bahwa nilai-nilai itu sebenarnya tidak pernah luntur, tetapi komitmen kita untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai itulah yang lapuk tererosi nilai-nilai superfisial yang tampak lebih menjanjikan dalam zaman yang serba instan. Ada kecenderungan untuk lebih mengedepankan format ketimbang substansi, prestise lebih penting ketimbang prestasi.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai wawasan kebangsaan. Topik ini sangat relevan dan signifikan utamanya ketika kita berbicara tentang pengaruh globalisasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan semakin terkoneksinya pengetahuan dan sumber-sumber daya potensial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam konteks ini, dunia cenderung menjadi rata dengan ciri-ciri ekuualitas kesempatan bagi setiap orang untuk maju dan berkembang. Wawasan kebangsaan yang dinaungi oleh nilai-nilai luhur bangsa niscaya akan mengukuhkan eksistensi NKRI dalam percaturan hubungan antarbangsa.

PENGERTIAN WAWASAN KEBANGSAAN

Wawasan kebangsaan adalah cara seseorang atau sekelompok orang melihat keberadaan dirinya yang dikaitkan dengan nilai-nilai dan spirit kebangsaan dalam suatu negara. Cara melihat dirinya ini terkandung makna sebagai kemampuan diri untuk merasa bahwa dirinya adalah bagian integral dari bangsa dan negara di mana dirinya berada. Semakin mereka mengerti dan mendalami nilai-nilai dan spirit yang telah disepakati bersama dalam suatu negara, serta menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka semakin kokoh pula keberadaan bangsa dan negaranya.

Nilai dan spirit dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang disepakati dan dirumuskan oleh pendiri bangsa sebagai pedoman merupakan falsafah hidup bangsa. Dengan demikian, kesepakatan berbangsa berarti bahwa warga suatu bangsa tidak akan mengkhianati perjuangan para pendahulunya dan dengan senang hati akan mendalami falsafah yang telah disepakati itu. Kesetiaan ini adalah ciri utama anggota dari suatu negara bangsa yang diwujudkan dalam perilaku yang didasari oleh nilai-nilai luhur bangsanya.

Kebangsaan yang berasal dari bangsa dapat mengandung arti ciri-ciri yang menandai golongan bangsa tertentu dan dapat pula mengandung arti kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Dengan perkataan lain, kebangsaan menunjukkan pengertian kesadaran dan sikap yang memandang dirinya sebagai suatu kelompok bangsa yang sama dengan keterikatan sosio-kultural yang disepakati bersama. Keterikatan ini menjadi titik tolak untuk menyepakati tindakan yang akan dilakukan dalam upaya mewujudkan cita-cita bersama.

Dalam rangka menerapkan konsep wawasan kebangsaan perlu dipahami aspek moral dan aspek intelektual. Aspek moral konsep wawasan kebangsaan menyaratkan adanya komitmen pada warga negara untuk turut bekerja bagi kelanjutan eksistensi bangsa dan bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa. Aspek intelektual wawasan kebangsaan juga menghendaki pengetahuan yang memadai mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa, baik saat ini maupun di masa datang dan berbagai potensi yang dimiliki bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, maka wawasan kebangsaan ini akan menentukan cara suatu bangsa mendayagunakan kondisi geografis negaranya, sejarah, sosio-budaya, ekonomi, dan politik serta pertahanan dan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasionalnya. Wawasan ini menentukan bagaimana bangsa itu menempatkan dirinya dalam tata berhubungan dengan sesama bangsanya dan dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia (internasional).

WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA

Wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI yang telah berkembang dan mengkrystal tidak lepas dari perjalanan sejarah bangsa Indone-

sia dalam membentuk negara ini. Konsep wawasan kebangsaan Indonesia tercetus pada waktu diikrarkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai tekad perjuangan sebagai pernyataan eksistensi bangsa Indonesia yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Wawasan seperti itu pada hakikatnya tidak mengenal perbedaan asal-usul kesukuan, keturunan, agama, ataupun warna kulit. Dengan perkataan lain, wawasan kebangsaan Indonesia lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI.

Untuk lebih dapat memahami konsep wawasan kebangsaan Indonesia, kiranya perlu disimak berbagai hal yang melatarbelakangi lahirnya konsep tersebut dari telaahan dokumen berikut ini.

Latar Belakang Sejarah

Pada abad ke 7 sampai dengan 16 yang disebut sebagai masa Kerajaan Nusantara terdapat dua kerajaan yaitu Sriwijaya (abad ke 7 sampai dengan abad ke 12) dan Majapahit (abad ke 13 sampai dengan ke 16) yang telah mampu membawa bangsa Indonesia mencapai puncak kejayaannya sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur serta berperan penting di kawasan Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sejak dulu telah memiliki wawasan kebangsaan.

Perjuangan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa barat seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Perancis, dan Jepang, sekalipun pada awalnya bersifat lokal, telah membuktikan bahwa semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat menggerakkan upaya mewujudkan cita-cita untuk menjadi negara yang merdeka. Dalam perjalanan sejarah tersebut, timbul pula gagasan sikap dan tekad yang bersumber dari nilai-nilai budaya yang mewarnai perwujudan cita-cita luhur kebangsaan.

Nilai-nilai Dasar Wawasan Kebangsaan

Nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki enam dimensi manusia yang mendasar sebagai berikut.

- Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.
- Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu.
- Cinta akan tanah air dan bangsa.
- Demokrasi atau kedaulatan rakyat.
- Kesetiakawanan sosial.
- Cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan nilai-nilai dasar itu, wahana kehidupan religius diwujudkan dengan memeluk agama dan menganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dilindungi oleh negara dan sewajarnya mewarnai hidup kebangsaan. Wawasan kebangsaan membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai obyek dan subyek usaha pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan falsafah hidup Pancasila.

Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan menempatkan manusia pada pusat hidup bangsa. Hal ini berarti bahwa dalam persatuan dan kesatuan bangsa masing-masing pribadi harus dihormati. Bahkan lebih dari itu, wawasan kebangsaan menegaskan bahwa manusia seutuhnya adalah pribadi atau subyek dari semua usaha pembangunan bangsa. Semua usaha pembangunan dalam segala bidang kehidupan berbangsa

bertujuan agar masing-masing pribadi bangsa dapat menjalankan hidupnya secara bertanggungjawab demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang merdeka, maju, dan mandiri akan berhasil dengan kesatuan dan persatuan bangsa yang kukuh dan berjaya. Tanpa itu, bangsa Indonesia dengan gampang terpecah belah dan tidak akan mampu bertahan melaksanakan beradaptasi dengan berhasil dalam zaman yang berubah dengan cepat.

Cinta akan tanah air dan bangsa menegaskan nilai sosial yang mendasar. Wawasan kebangsaan menempatkan penghargaan tinggi atas nilai-nilai kebersamaan yang melindungi setiap warga dan menyediakan tempat untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Hal ini juga sekaligus mengungkapkan hormat terhadap solidaritas manusia yang mengakui hak dan kewajiban asasi tanpa diskriminasi atas dasar apapun.

Paham kebangsaan dapat bersifat luas dan dapat pula sempit. Fasisme, Naziisme, atau berbagai bentuk kepicikan pikiran sebagai nasionalisme yang sempit jelas ditolak bangsa Indonesia. Dengan demikian, esensi nasionalisme adalah suatu tekad bersama yang tumbuh dari bawah untuk bersedia hidup sebagai suatu bangsa dalam negara merdeka. Dengan kata lain, kebangsaan/nasionalisme adalah paham kebersamaan, persatuan, dan kesatuan.

Nasionalisme atau kebangsaan selalu berkaitan erat dengan demokrasi, karena tanpa demokrasi, kebangsaan akan mati bahkan merosot menjadi Fasisme/Naziisme atau berbagai bentuk isme berpikiran sempit. Hal ini bukan saja berbahaya bagi kalangan minoritas dalam bangsa yang bersangkutan, tetapi juga berbahaya bagi bangsa lain dan kemanusiaan umumnya.

Kesetiakawanan sosial sebagai nilai-nilai merupakan rumusan lain dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Wawasan kebangsaan menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat lebih utama ketimbang kesejahteraan perseorangan atau sekelompok orang, sekalipun yang belakangan ini juga dimungkinkan. Kesejahteraan sosial boleh disebut kesejahteraan umum mencakup keseluruhan lembaga dan usaha dalam kehidupan sosial. Dalam konsep ini cukup peluang bagi setiap orang, keluarga, dan kelompok-kelompok sosial untuk berkiprah memenuhi kebutuhan secara adil.

Salah satu ciri khas negara demokratis yang membedakannya dari negara yang totaliter adalah toleransi. Wawasan kebangsaan Indonesia menegaskan bahwa demokrasi tidak sama dengan soal menang atau kalah, mayoritas atau minoritas. Dalam demokrasi kita segala sesuatu dapat diputuskan dengan cara musyawarah dan tidak mengutamakan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. Hal yang sama nampak dalam kerukunan hidup beragama dan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Unsur Wawasan Kebangsaan

Dalam membicarakan wawasan kebangsaan, terdapat tiga unsur yang penting dan perlu dipahami yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan.

1. **Rasa Kebangsaan.** Rasa kebangsaan adalah suatu perasaan seluruh komponen bangsa terhadap kondisi bangsa Indonesia dalam perjalanan menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Rasa kebangsaan sebenarnya merupakan sublimasi dari Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad mejadi bangsa yang kuat, dihormati, dan disegani di antara bangsa-bangsa di dunia.

2. ***Paham Kebangsaan.*** Substansi paham kebangsaan adalah pengertian tentang bangsa dan cara mewujudkan masa depannya. Paham kebangsaan merupakan pemahaman rakyat dan masyarakat terhadap bangsa dan negara Indonesia.
3. ***Semangat Kebangsaan.*** Semangat kebangsaan atau yang biasa disebut dengan nasionalisme merupakan perpaduan atau sinergi dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan yang terpancar dari kualitas dan ketangguhan bangsa tersebut dalam menghadapi berbagai ancaman. Dari semangat kebangsaan akan mengalir rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban, dan menumbuhkan jiwa patriotisme.

INTEGRASI NASIONAL

Pengertian

Integrasi nasional diartikan sebagai suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa. Integrasi nasional sebagai upaya atau proses pembauran berbagai aspek yang menjadi ciri bangsa harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai satu bangsa.

Konsep Integrasi Nasional Indonesia

Integrasi nasional sebagai konsep dalam kaitan dengan wawasan kebangsaan dalam NKRI pada dasarnya berlandaskan pada aliran pemikiran atau paham integralistik. Menurut paham ini, untuk mengenal dan memahami sesuatu harus ditemukan kaitannya dengan yang lain. Pemahaman integrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia bersumber dari pemikiran Mr. Soeparmo yang disampaikan di depan sidang BPUPKI pada tahun 1945. Paham integralistik ini merupakan

salah satu aliran teori tentang negara. Menurut aliran pikiran integralistik, pembentukan negara tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai kesatuan.

Negara adalah suatu masyarakat yang integral. Semua golongan, bagian, dan semua anggotanya berhubungan erat satu sama lain. Hal yang terpenting dalam negara yang berdasarkan aliran pikiran integral adalah kehidupan bangsa secara keseluruhan. Negara menjamin keselamatan hidup bangsa secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa di dalam masyarakat yang integralistik, setiap anggota, warga, dan setiap golongan diakui dan dihormati kehadiran dan keberadaannya serta diakui hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan bersama. Sebaliknya, setiap warga negara berkewajiban dan bertanggung jawab atas terlindungnya kepentingan, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat seluruhnya.

Secara lebih rinci ciri-ciri tata nilai integralistik adalah sebagai berikut.

- Bagian atau golongan yang terlibat berhubungan erat sebagai satu kesatuan.
- Eksistensi setiap unsur hanya berarti dalam hubungannya dengan keseluruhan.
- Tidak terjadinya situasi yang memihak pada golongan tertentu.
- Tidak terjadi dominasi mayoritas dan tirani minoritas.
- Tidak memberi tempat bagi paham individualisme, liberalisme, dan totalisme.
- Mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi seluruh bangsa dan negara.

- Mengutamakan penunaian kewajiban daripada penuntutan pada hak-hak dan pribadi/golongan.
- Mengutamakan upaya memadu pendapat daripada mencari menang sendiri.
- Bersemangat kerukunan, keutuhan, persatuan, kebersamaan, setia kawan, dan gotong royong.
- Saling menolong, membantu, dan bekerja sama.
- Berdasarkan kasih sayang dan keinginan berkorban..

Penerapan nilai keberhasilan dalam kehidupan menuntut pada setiap manusia untuk melakukan pengendalian diri, yakni untuk mengarahkan aktivitas pribadinya menuju terselenggaranya kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang demi tercapainya kehidupan bersama yang sejahtera, adil, makmur, dan bahagia lahir batin. Nilai kebersamaan menuntut kepada tiap individu untuk meletakkan kepentingan dan keinginan pribadi dalam rangka kebersamaan hidup dan mewujudkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam hal ini tidak berarti bahwa kepentingan pribadi atau golongan disingkirkan atau ditiadakan. Kepentingan pribadi atau golongan justru merupakan motivasi terbinanya kesejahteraan bersama. Dengan menerapkan nilai kebersamaan diharapkan tercipta suatu keselarasan dan keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani, antara wanita dan pria, antara kepentingan individu dan masyarakat, dan antara kehidupan duniawi dan kehidupan akhirat.

Nilai-nilai yang merupakan penjabaran tata nilai integralistik ini diterapkan oleh bangsa Indonesia dalam mengatur tata hubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan bangsanya, dan dengan alam sekitarnya. Nilai-nilai keselarasan, keserasian, keseimbangan, kebhinekatunggalikaan, dan kekeluargaan mewarnai

semua hubungan tersebut. Inilah yang kemudian dirumuskan menjadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar negara Republik Indonesia dan ideologi bangsa.

Integrasi nasional dapat dipahami dari dua segi yaitu integrasi nasional secara vertikal dan integrasi nasional secara horizontal. Integrasi nasional secara vertikal membahas bagaimana mempersatukan pemerintah nasional dengan rakyatnya, yang tersebar dalam daerah yang luas. Ini berarti kepemimpinan yang kuat harus dapat mempersatukan kepemimpinan nasional dan kepemimpinan di tingkat daerah. Sedangkan integrasi nasional secara horizontal membahas bagaimana mempersatukan rakyat yang majemuk, hidup dalam berbagai golongan primordial dengan keragaman nilai lembaga dan adat kebiasaannya, sehingga merasa menjadi bagian dari satu bangsa yang sama.

Integrasi nasional secara vertikal memiliki empat tugas konstitusional yang bersifat abadi bagi pemerintah Indonesia. Keempat tugas itu adalah:

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. memajukan kesejahteraan umum
3. mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Keempat tugas pemerintah itu merupakan misi nasional sekaligus menjadi tolok ukur bagi keberhasilan atau kegagalannya.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang undang dasar. Sudah tentu presiden tidak bekerja sendiri. Di tingkat pusat, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden, para menteri, serta para

pimpinan lembaga pemerintah non departemen. Di tingkat daerah presiden dibantu oleh para gubernur beserta seluruh jajarannya. Di luar negeri presiden dibantu oleh para duta besar dan para duta. Sekretariat Negara memberikan pelayanan kepada presiden dari segi administratif.

Untuk tingkat daerah, dikenal adanya perbedaan antara satuan masyarakat sosiokultural dan satuan masyarakat sosial politik. Perbedaan ini amat penting untuk benar-benar dipahami. Secara kultural, bangsa kita adalah bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu sendiri adalah produk dari sejarah yang panjang dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, secara sadar kita mengambil sesanti Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang negara.

Kemajemukan ini akan mempunyai relevansi ideologi, politik, dan pemerintahan. Ideologi persatuan yang disepakati para pemimpin di tingkat nasional masih harus dipahami dan didukung oleh masyarakat kita yang tersebar di daerah kepulauan yang luas ini. Pemahaman ini jelas akan bersinggungan dengan sistem nilai budaya lokalnya sendiri. Hal ini meruapakan hal yang wajar saja dan memang demikian seharusnya. Dari sisi politik dan pemerintahan, kita bersama mengetahui bahwa walaupun seluruh peraturan perundang-undangan kita berlaku sama untuk seluruh daerah, namun implementasinya di lapangan akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya ini.

Gagasan satuan masyarakat sosial politik ditemukan dalam pasal 18 UUD tahun 1945 sebagai berikut.

1. NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian, satuan masyarakat sosial politik ini merupakan masyarakat hukum, dibentuk dengan undang-undang, dan merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional.

Secara ideologis dan konstitusional, masalah sistem pemerintah yang kita hadapi adalah bagaimana menyusun tatanan pemerintahan yang dapat membuka peluang terlaksananya peran fungsional terpadu, baik bagi satuan masyarakat sosiokultural yang bersifat asli ini maupun pada satuan masyarakat sosiopolitik yang dirancang secara nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi peluang untuk mengadakan penyesuaian secara lokal pada ketentuan-ketentuan hukum yang secara nasional dibuat dalam garis-garis besar. Beberapa daerah bahkan sudah menemukan wujudnya yang operasional, seperti

gerakan “Manunggal Sakato” yang dikembangkan di daerah Sumatera Barat. Dan “Masipature Huta Na Be” yang dikembangkan di Sumatera Utara.

WAWASAN KEBANGSAAN SEBAGAI KEKUATAN NASIONAL

Dengan pandangan yang jauh ke depan, para pendiri negara ini telah meletakkan dasar-dasar yang kuat agar negara ini dapat tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu prinsip dasar yang diletakkan adalah prinsip negara kesatuan yang bersifat integralistik dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.

Salah satu pertimbangan dalam menetapkan prinsip tersebut adalah bahwa negara yang akan dibangun nantinya adalah negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar yang terdiri atas berbagai suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan berbagai kemajemukan lainnya. Kondisi tersebut pada satu sisi mengandung kekuatan apabila warga masyarakat dapat hidup bersama dalam kemajemukan sebagai satu kesatuan yang harmonis. Namun, kemajemukan itu akan menjadi kelemahan jika ia menimbulkan kecurigaan, pertentangan, dan bahkan saling menghancurkan satu sama lain.

Dengan prinsip negara kesatuan serta sistem pemerintahan yang demokratis diharapkan seluruh komponen masyarakat dan bangsa dapat hidup secara harmonis dalam NKRI. Prinsip pemerintahan yang demokratis dan dengan kekuasaan yang didesentralisasikan akan mendorong pemerintah daerah dan masyarakat untuk semakin mandiri. Prinsip tersebut juga perlu didukung dengan pemerintahan yang kuat dan berwibawa untuk menjamin terpeliharanya stabilitas nasional dan kesatuan bangsa. Semua hal itu merupakan potensi luar

biasa untuk mewujudkan harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah selaras dengan wawasan kebangsaan yang memahami dan menghargai keberadaan daerah yang memiliki karakteristik tertentu. Wawasan kebangsaan yang di dalamnya terbuka kesempatan bagi berkembangnya wawasan kewilayahan/ kedaerahan yang semakin dewasa dan mandiri akan menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersatukan dan membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan mandiri.

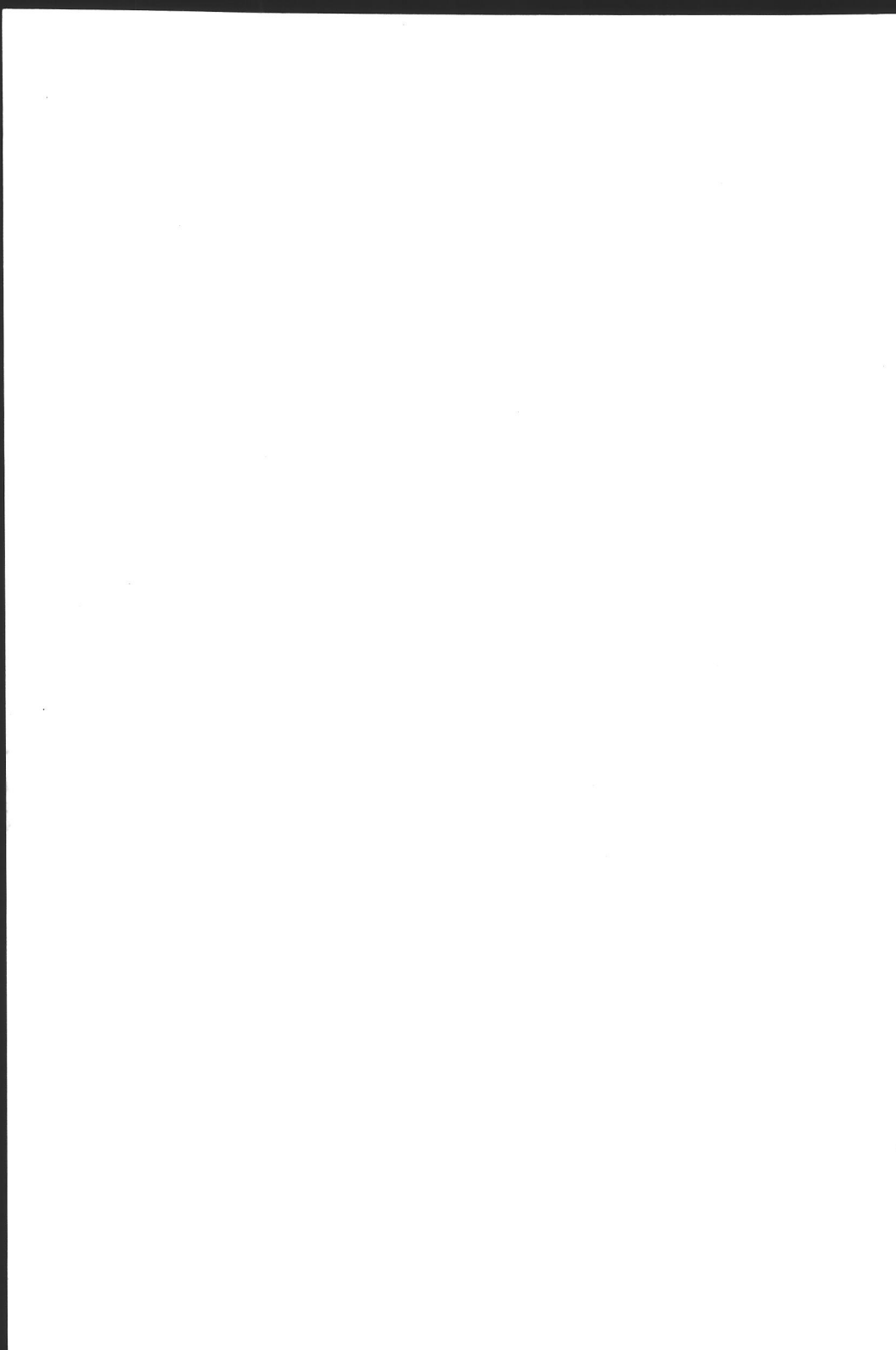
RANGKUMAN

1. Wawasan kebangsaan adalah cara seseorang atau sekelompok orang melihat keberadaan dirinya yang dikaitkan dengan nilai-nilai dan spirit kebangsaan dalam suatu negara. Cara melihat dirinya ini terkandung makna sebagai kemampuan diri untuk merasa bahwa dirinya adalah bagian integral dari bangsa dan negara di mana dirinya berada.
2. Konsep wawasan kebangsaan Indonesia tercetus pada waktu diikrarkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai tekad perjuangan sebagai pernyataan eksistensi bangsa Indonesia yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Wawasan seperti itu pada hakikatnya tidak mengenal perbedaan asal-usul kesukuan, keturunan, agama, ataupun warna kulit.
3. Nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki enam dimensi kemanusiaan yang mendasar yang antara lain meliputi penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa; tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu; cinta akan tanah air dan bangsa, demokrasi atau kedaulatan rakyat; kesetiakawanan sosial; dan cita-cita mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

4. Dalam wawasan kebangsaan terdapat tiga unsur yang penting dan perlu dipahami yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan adalah perasaan seluruh komponen bangsa terhadap kondisi bangsa Indonesia dalam perjalanan menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Paham kebangsaan adalah pengertian tentang bangsa dan cara mewujudkan masa depannya. Semangat kebangsaan atau nasionalisme merupakan perpaduan atau sinergi dari rasa kebangsaan dan paham kebangsaan yang terpancar dari kualitas dan ketangguhan bangsa tersebut dalam menghadapi berbagai ancaman.
5. Integrasi nasional diartikan sebagai suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa. Integrasi nasional sebagai upaya atau proses pembauran berbagai aspek yang menjadi ciri bangsa harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai satu bangsa. Integrasi nasional sebagai konsep dalam kaitan dengan wawasan kebangsaan dalam NKRI pada dasarnya berlandaskan pada aliran pemikiran atau paham integralistik.
6. Integrasi nasional secara vertikal memiliki empat tugas konstitusional yang bersifat abadi bagi pemerintah Indonesia. Keempat tugas itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tugas pemerintah itu merupakan misi nasional sekaligus menjadi tolok ukur bagi keberhasilan atau keagalannya.

LATIHAN

1. Jelaskan pengertian wawasan kebangsaan.
2. Jelaskan mengapa Sumpah Pemuda dipandang sebagai awal tercetusnya wawasan kebangsaan
3. Jelaskan enam dimensi kemanusiaan dalam nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan.
4. Jelaskan tiga unsur wawasan kebangsaan.
5. Jelaskan pengertian integrasi nasional.
6. Jelaskan empat tugas konstitusional pemerintah Indonesia dalam rangka integrasi nasional yang bersifat vertikal.



Bab 4

Permasalahan

Wawasan Kebangsaan

PENGANTAR

Dalam bab sebelumnya telah dikemukakan bahwa wawasan kebangsaan merupakan kemampuan diri untuk merasa bahwa dirinya adalah bagian integral dari bangsa dan negara di mana dirinya berada. Rasa kebangsaan ini mendorong timbulnya semangat kebangsaan atau nasionalisme yang mencerminkan kualitas ketangguhan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman yang merongrong disintegrasi. Berbagai konflik vertikal dan horizontal di beberapa tempat di tanah air menunjukkan bahwa upaya meningkatkan wawasan kebangsaan seharusnya dilakukan secara terus-menerus dibarengi dengan keteladanan dari semua tokoh masyarakat, baik formal maupun informal.

Ada kesan bahwa wawasan kebangsaan seolah telah merupakan sesuatu yang *given*, sehingga kita cenderung menerima apa adanya. Ketika kehidupan bernegara dan berbangsa memasuki era baru dengan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kita melihat berbagai peristiwa yang menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang kebangsaan ternyata begitu dangkal. Konflik di berbagai tempat yang telah sampai pada taraf membahayakan integrasi bangsa menyadarkan kita bahwa wawasan kebangsaan tidak boleh sekadar urusan indoktrinasi. Seluruh dimensi kemanusiaan dalam nilai-nilai dasar wawasan kebangsaan harus dipegang teguh secara konsisten dalam upaya kita memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam bab ini, yang merupakan bab terakhir buku ini, akan dibahas permasalahan wawasan kebangsaan. Pertama akan dibahas kemerosotan faktor integrasi bangsa yang kemudian dilanjutkan dengan bahasan tentang upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

KEMEROSOTAN FAKTOR INTEGRASI BANGSA

Nilai-nilai wawasan kebangsaan cenderung semakin luntur dalam kehidupan kita berbangsa. Hal ini dapat dilihat secara jelas misalnya dengan timbulnya berbagai konflik di berbagai tempat di tanah air. Misalnya di Maluku, di Kalimantan, di Aceh, di Papua, dan di berbagai tempat lainnya. Bahkan di sejumlah tempat, Papua Maluku, dan Aceh, mereka yang tidak percaya dengan konsep kebangsaan sebagaimana yang telah diperjuangkan oleh para pendiri negara ini cenderung masih menunjukkan keinginan untuk memisahkan diri untuk menjadi negara sendiri terlepas dari NKRI.

Di sisi lain para pemimpin sendiri seringkali kurang sungguh-sungguh berusaha agar segera dapat mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Sangat banyak terjadi penyimpangan pengelolaan negara menunjukkan pengkhianatan terang benderang terhadap semangat persatuan dan kesatuan. Dalam mengelola sumber-sumber daya, upaya untuk lebih mendulukan pribadi atau kelompoknya sendiri, tampak begitu kental. Berbagai praktik pengkhianatan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia itu menunjukkan begitu rapuhnya konsistensi komitmen kita untuk mengejawantahkan nilai-nilai luhur bangsa dalam perilaku kita sehari-hari.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan otonomi daerah dipandang akan mendorong terciptanya kemandirian masyarakat daerah. Namun, perlu diwaspadai kemungkinan tumbuhnya

keangkuhan etnis, sikap kedaerahan yang etnosentris, serta fanatisme putra daerah yang dapat memicu terjadinya konflik dan merusak wawasan kebangsaan NKRI. Hal ini sebenarnya telah menggejala di berbagai daerah. Ungkapan bahwa untuk dapat menduduki posisi tertentu dalam birokrasi pemerintah di daerah tertentu dengan persyaratan putra asli setempat menunjukkan betapa picik dan sempitnya pikiran kita.

Faktor sosial-ekonomi merupakan faktor yang ikut menentukan kuat lemahnya suatu bangsa. Modernisasi yang diperkenalkan globalisasi cenderung serba rasional, pragmatis, materialistis, dan hedonistis yang pada kenyataannya semakin memengaruhi sistem nilai, cara pandang, dan model tindakan masyarakat yang rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan dapat memicu terjadinya disintegrasi bangsa. Kondisi ini dapat dilihat dari semakin banyaknya kasus korupsi, merebaknya kriminalitas, seks bebas dan lain-lain merupakan contoh dampak negatif globalisasi.

Radikalisme serta konflik horizontal dan vertikal yang terjadi akhir-akhir ini, mengakibatkan menipisnya rasa aman yang jika dibiarkan dapat mengubah cara pandang, baik dari masyarakat Indonesia sendiri terhadap aspek politik, sosio-ekonomi dan kepastian hukum di dalam negeri, maupun cara pandang dunia terhadap Indonesia. Radikalisme di Indonesia saat ini, umumnya merupakan perlawanan terhadap kapitalisme, ketidakadilan, pengangguran, dan kemiskinan. Ini adalah bentuk agresivitas sebagai perwujudan dari perasaan kecewa yang berkepanjangan.

Berbagai permasalahan yang diuraikan di atas disebabkan oleh melemahnya penghayatan dan penerapan nilai-nilai kebangsaan, serta rendahnya pengetahuan masyarakat akan kewilayahan yang harus diperjuangkan dalam kancah internasional. Pengetahuan kewilayahan

seringkali hanya didasarkan atas peristiwa historis yang dipahami sebagai hasil perjuangan para pendiri NKRI.

Pemahaman dan pendalaman akan wawasan kebangsaan perlu senantiasa diupayakan secara terus menerus. Gerakan ini merupakan upaya mengingatkan kembali warga negara untuk sadar akan kewajibannya berjuang membangun bangsa dan negara dalam perkembangan dan persaingan dunia. Berikut adalah uraian penyegaran tentang keberadaan bangsa dan negara Indonesia dan nilai-nilai semangat perjuangan yang harus terus ditumbuhkembangkan.

UPAYA MENINGKATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Faktor-faktor yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dapat kita sebut sebagai peluang-peluang yang harus kita pelihara dan kembangkan sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat bahkan memecah belah persatuan dan kesatuan dapat kita sebut sebagai hambatan-hambatan yang harus kita cegah. Itulah yang menjadi tantangan dalam rangka pemibinaan wawasan kebangsaan dewasa ini.

Hal-Hal Yang Harus Dipelihara

- Keutuhan dan kedaulatan wilayah negara dari Sabang sampai Merauke.
- Pancasila dan UUD tahun 1945 sebagai acuan dasar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Konsep wawasan nusantara dan ketahanan nasional sebagai acuan operasional.

- Kekayaan budaya bangsa Indonesia termasuk hasil-hasil pembangunan nasional sebagai perwujudan cipta, rasa dan karsa bangsa Indonesia.

Hal-Hal yang Harus Dicegah

- Pikiran dan perasaan lebih superior, lebih kuat, atau lebih baik dari suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, atau golongan masyarakat lain. Pikiran dan perasaan seperti itu jelas bertolak dari fanatisme kelompok atau golongan yang sempit dan sangat bertentangan dengan wawasan kebangsaan membuka ruang gerak dan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang atas dasar saling mengakui, menghargai, melengkapi, dan memperkaya.
- Kesenjangan pembangunan antarwilayah harus dicegah karena kemajuan pembangunan yang terlalu pesat di satu daerah sementara di daerah lainnya sangat tertinggal dapat menimbulkan kecemburuan sosial.
- Kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebar antargolongan penduduk harus dicegah melalui upaya sungguh-sungguh untuk mengentaskan kemiskinan.
- Upaya-upaya untuk mengekang proses demokratisasi dan desentralisasi dengan alasan stabilitas dan kesatuan bangsa yang berlebih-lebihan harus dicegah. Perlu diberikan ruang gerak dan peluang yang cukup memadai untuk mengembangkan aspirasi, prakarsa, kreatifitas, dan partisipasinya.

Hal-Hal yang Perlu Dikembangkan

Proses untuk membina wawasan kebangsaan, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta membentuk dan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia haruslah ditempuh melalui rekayasa sosial

sehingga tidak bergerak ke arah yang salah. Proses itu haruslah ditumbuhkembangkan dari nilai-nilai luhur Pancasila yang diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan zaman. Proses ke arah itu dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang bercirikan konsepsi wawasan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan untuk memperkuat ketahanan nasional.

Agar perubahan sebagai akibat pembangunan bergerak ke arah yang diinginkan, maka ia harus direncanakan dan dikendalikan. Perubahan itu sendiri haruslah bermakna, dalam arti memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan yang lebih baik. Dampak negatif yang potensial harus dicegah sedini mungkin sebelum berkembang tak terkendali.

Bangsa Indonesia di dalam proses sejarahnya telah mengalami berbagai kontak budaya antarbangsa, suku bangsa, dan kelompok etnis. Kontak-kontak budaya yang berlangsung sepanjang masa itu dimungkinkan oleh letak kepulauan nusantara di antara dua benua dan dua samudra. Dalam kontak-kontak budaya yang diartikan sebagai interaksi kebudayaan telah terjadi integrasi antara unsur-unsur luar dan unsur-unsur yang berasal dari kebudayaan daerah yang diangkat untuk memperkaya khasanah kebudayaan nasional. Dalam hubungan ini semua kebudayaan daerah, baik yang besar, kuat, dan mapan maupun yang kecil, lemah, dan belum mapan harus diberikan ruang gerak dan kesempatan yang sama untuk hidup dan berkembang sebagai bagian dan budaya bangsa kita yang ikut memperkaya dan memperindah taman sari khasanah kebudayaan nasional.

Dalam hubungan ini pula beberapa gagasan strategis yang perlu dikembangkan sebagai berikut.

- Menggali, menghimpun, mengidentifikasi, mendeskripsikan berbagai aspek budaya, serta menyusun peta bahasa dan etnografi melalui suatu pusat studi nasional yang juga memiliki sistem informasi budaya secara nasional.
- Mengadakan kontak lintas budaya dan media apresiasi antarbudaya dengan prinsip saling mengakui, saling menghargai, dan saling melengkapi untuk memperkaya khasanah budaya nasional.
- Pengarahan pendidikan anak sejak dini untuk memahami dan menghargai budaya lokal serta memahami dan menghargai juga budaya dari kelompok suku bangsa lain.
- Terus mengembangkan pendidikan agar secara aktual dapat selalu menjawab tuntutan perkembangan zaman sebagai upaya sadar mewariskan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berwawasan kebangsaan.
- Meningkatkan daya adaptasi masyarakat terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dengan meningkatkan nasionalisme bangsa dan wawasan kebangsaan, kita berharap fanatisme golongan yang bersumber pada primordialisme dapat terkikis secara berangsur-angsur.

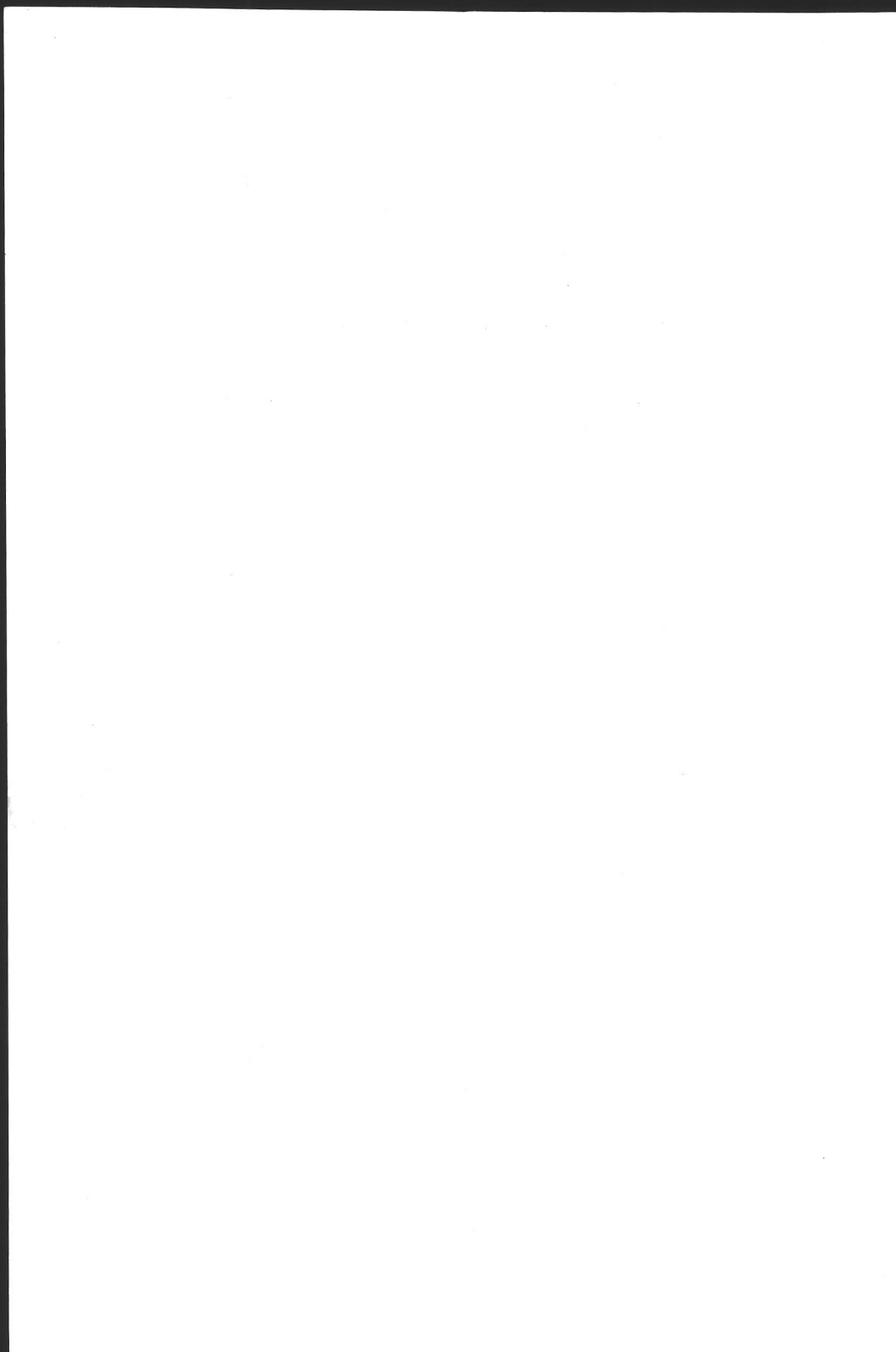
RANGKUMAN

1. Nilai-nilai wawasan kebangsaan cenderung semakin luntur dalam kehidupan kita berbangsa. Hal ini dapat dilihat secara jelas misalnya dengan timbulnya berbagai konflik di berbagai tempat di tanah air.
2. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan otonomi daerah dipandang akan mendorong terciptanya kemandirian masyarakat daerah. Namun, perlu diwaspadai kemungkinan tumbuhnya keangkuhan etnis, sikap kedaerahan yang etnosentris, serta fanatisme putra daerah yang dapat memicu terjadinya konflik dan merusak wawasan kebangsaan NKRI.

3. Faktor sosial-ekonomi merupakan komponen kehidupan yang ikut menentukan kuat lemahnya suatu bangsa. Modernisasi yang diperkenalkan globalisasi cenderung serba rasional, pragmatis, materialistis, dan hedonistis yang pada kenyataannya semakin memengaruhi sistem nilai, cara pandang, dan model tindakan masyarakat yang rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan dapat memicu terjadinya disintegrasi bangsa.
4. Radikalisme serta konflik horizontal dan vertikal yang terjadi akhir-akhir ini, mengakibatkan menipisnya rasa aman yang berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan dan menimbulkan pandangan negatif terhadap Indonesia. Radikalisme di Indonesia umumnya merupakan perlawanan terhadap kapitalisme, ketidakadilan, pengangguran, dan kemiskinan. Ini adalah bentuk agresivitas sebagai perwujudan dari perasaan kecewa yang berkepanjangan.
5. Hal-hal yang harus dipelihara untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa antara lain keutuhan dan kedaulatan wilayah negara dari Sabang sampai Merauke, Pancasila dan UUD tahun 1945 sebagai acuan dasar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta konsep wawasan nusantara dan ketahanan nasional sebagai acuan operasional.
6. Hal-hal yang harus dicegah adalah pikiran dan perasaan lebih superior, lebih kuat, atau lebih baik dari suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, atau golongan masyarakat lain; kesenjangan pembangunan antarwilayah; kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebar antargolongan penduduk; upaya-upaya untuk mengekang proses demokratisasi dan desentralisasi dengan alasan stabilitas dan kesatuan bangsa yang berlebih-lebihan.
7. Proses untuk membina wawasan kebangsaan, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta membentuk dan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia haruslah ditempuh melalui rekayasa sosial sehingga tidak bergerak ke arah yang salah. Proses itu haruslah ditumbuhkembangkan dari nilai-nilai luhur Pancasila yang diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan zaman.

LATIHAN

1. Jelaskan masalah-masalah yang menggejala dalam kaitannya dengan wawasan kebangsaan dewasa ini.
2. Jelaskan mengapa kebijakan otonomi daerah dapat menimbulkan sikap kedaerahan yang sempit.
3. Jelaskan mengapa globalisasi dapat menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bangsa Indonesia.
4. Apa dampak radikalisme terhadap citra bangsa Indonesia di dunia internasional. Jelaskan juga alasan yang mendasari timbulnya radikalisme itu.
5. Jelaskan hal-hal yang perlu dipelihara dan dicegah untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
6. Jelaskan hal-hal yang harus ditempuh untuk membina wawasan kebangsaan.



Daftar Pustaka

- Lembaga Pengkajian Strategi dan Pembangunan & PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 1994 "Pendidikan Wawasan Kebangsaan", Tantangan dan Dinamika Perjuangan Kaum Cendekiawan Indonesia.
- Dimensi Rohani dan Wawasan Kebangsaan Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bintoro Tjokroamidjojo, 1996.
- Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Moerdiono, 1991, yang berkenaan Integritas Nasional.
- Sistem Pemerintahan Indonesia, Kansil, 1987.
- Dasar-dasar Ilmu Tatanegara, Budiyanto, 1997.
- Ilmu Politik dan Perspektifnya, Hari Cahyono, 1986.
- Cinta Negara Persatuan Indonesia, Disunting oleh Soeprapto – Saafroedin Bahar – Ismail Arianto, BP7 Pusat, 1995.
- Pancasila Sebagai Ideologi, Disunting oleh: Oetoyo Oesman dan Alfian, BP-7 Pusat , 1993.
- Nation Building. Andi Faisal Bakti Ph.D. Churia. 2006.
- Undang Undang Dasar Tahun 1945, Lembaga Informasi Nasional.
- Thomas L. Friedman, *The World is Flat, the Globalized World in the Twent-First Century*, London: Penguin Books Ltd., 2006.

Perpustakaan
Jenderal

3
E